



LUMAJANG
KABUPATEN

RLPPD



RANU KLAKAK

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah
KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO	1
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	11
A. URUSAN PENDIDIKAN	11
B. URUSAN KESEHATAN	21
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	39
D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	45
E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS	49
F. URUSAN SOSIAL	62
BAB III HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	77
BAB IV REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	83
BAB V INOVASI DAERAH TAHUN 2021	90
BAB VI PENUTUP	95



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2021, dapat diselesaikan dengan baik.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Melalui penyusunan RLPPD, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipantau dan diketahui perkembangannya, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan. Selain itu, pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai informasi kepada masyarakat sekaligus perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Mudah-mudahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lumajang, Maret 2022

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

BAB I
CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Kinerja makro sangat erat kaitannya dengan beberapa indeks yang memengaruhi pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Adapun capaian kinerja makro di Kabupaten Lumajang sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lumajang

N O	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2020)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2021)	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,46	66,07	0,932
2	Angka Kemiskinan	9,83	10,05	2,238
3	Angka Pengangguran	3,36	3,51	4,464
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,79%	3,14%	212,545
5	Perdapatan Perkapita	28,71 juta	29,88 juta	4,075
6	Ketimpangan pendapatan	0.364	0.309	11,552

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada hakikatnya terkait erat dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Secara lebih detail Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup	Tahun	69,70	69,94	70,10	70,21
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,79	11,80	11,81	11,88
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,21	6,22	6,4	6,67
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.931	9.274	9.088	9.203
IPM		64,83	65,33	65,46	66,07
Pertumbuhan IPM	%	0,93	0,77	0,20	0,93

Sumber : Berita Resmi Statistik No.03/12/3508/Th. V, 9 Desember 2021

Berdasarkan tabel, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2018-2021 naik dari 64,83 pada Tahun 2018 menjadi 66,07 pada Tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dan Tahun 2021 dengan laju 0,93 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,20.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Tabel 1.3 Perbandingan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021

Uraian	Daerah	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Lumajang	64,83	65,33	65,46	66,07
	Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14
	Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, (Berita Resmi Statistik No. 03/12/3508/Th.V, 9 Desember 2021), (Berita Resmi Statistik No. 72/11/35/Th.XIX, 15 November 2021), (Berita Resmi Statistik No. 87/11/Th.XXIV, 15 November 2021)

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten yang mempunyai IPM kategori sedang di tingkat Jawa Timur. Pada Tahun 2021, walaupun mengalami peningkatan, namun peningkatannya tergolong lambat, untuk Kabupaten Lumajang perlu berbenah kembali agar nilai IPM membaik.

2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap wilayah.

Tabel 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021

Tahun	Garis Kemiskinan /GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2018	281.461,00	103,69	9,98
2019	296.633,00	98,88	9,49
2020	318.196,00	102,60	9,83
2021	334.906,00	105,25	10,05

Sumber : Berita Resmi Statistik No.04/12/3508/Th. XXI, 13 Desember 2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Lumajang, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, dapat dilihat dari konteks nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam beberapa terakhir bersifat fluktuatif. Jumlah penduduk miskin Tahun 2018 mencapai 103,69 ribu jiwa dan mengalami penurunan di Tahun 2019 menjadi 98,88 ribu jiwa, kenaikan kembali terjadi tahun 2021 menjadi 105,25 ribu jiwa.

**Tabel 1.5 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2021
di Kabupaten Lumajang**

Uraian	Daerah	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	Lumajang	%	9,98	9,49	9,83	10,05
	Jawa Timur	%	10,98	10,37	11,09	11,40
	Indonesia	%	9,66	9,22	9,78	10,14

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Maret 2021 (Berita Resmi Statistik No. 04/12/3508/Th.XXI, 13 Desember 2021), (Berita Resmi Statistik No. 44/07/35/Th.XIX, 15 Juli 2021), (Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th.XXIV, 15 Juli 2021)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lumajang jika dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Timur masih tergolong baik dikarenakan masih dibawah Capaian Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun, sedangkan dibandingkan dengan capaian nasional, rerata tiap tahunnya masih diatas nasional kecuali di Tahun 2021, capaian Kabupaten Lumajang untuk penduduk miskin berada dibawah capaian nasional.

3) Angka Pengangguran

Angka pengangguran dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 554.318 orang, berkurang 3.436 dibandingkan Agustus 2020. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebesar 0,72 persen poin.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 3,51 persen, naik 0,15 persen poin dibandingkan dengan TPT Agustus 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 13,37 persen.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebanyak 534.879 orang, berkurang sekitar 4.128 orang dari Agustus 2020. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, orang yang bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami kenaikan tertinggi sebesar 22,39 persen atau sebanyak 119.740 orang.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 837.424 orang, naik 3.934 orang dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 554.318 orang (66,19 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Tabel 1.6 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Lumajang

NO	Status Keadaan Tenaga Kerja	2020	2021
		Orang	Orang
1	Penduduk Usia Kerja (Usia 15 Tahun atau lebih)	833.490	837.424
2	Angkatan Kerja (AK)	557754	554318
	- Bekerja	539007	534879
	- Pengangguran	18747	19439
		persen	persen
3	TPT	3,36	3,51
4	TPAK	66,92	66,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Data Agustus 2021 (Berita Resmi Statistik No. 05/12/3508/Th.XXI, 27 Desember 2021)

Komposisi angkatan kerja Kabupaten Lumajang terdiri dari 534.879 orang penduduk yang bekerja dan 19.439 orang pengangguran. Dibandingkan Agustus 2020 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.436 orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 4.128 orang dan pengangguran bertambah sebanyak 692 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Kabupaten Lumajang pada Agustus 2021 sebesar 66,19 persen, turun sebesar 0,72 poin dibanding Agustus 2020.

Hasil analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 – 2021 Kabupaten Lumajang

Uraian	Satuan	Daerah	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Lumajang	2,55	2,81	3,36	3,51
		Jawa Timur	3,99	3,92	5,84	5,74
		Indonesia	5,30	5,30	7,07	6,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Agustus 2021 (Berita Resmi Statistik No. 05/12/3508/Th.XXI, 27 Desember 2021), (Berita Resmi Statistik No. 84/11/Th.XXIV, 5 November 2021), (Berita Resmi Statistik No. 69/11/35/Th.XIX, 5 November 2021),



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang dalam beberapa tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami masih berada di angka 2,55 dan 2,81 tetapi mengalami kenaikan pada Tahun 2020 sebesar 3,36 dan naik kembali sebesar 3,51 pada Tahun 2021. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada Tahun 2021 Jawa Timur mencapai 5,74 dan Indonesia sebesar 6,49 pada Tahun 2021.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.

Berdasarkan kontribusi per sektor PDRB terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lumajang sebagian besar ditunjang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa struktur/pola perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang mengalami pergeseran meskipun belum cukup signifikan namun terjadi secara keseluruhan berdampak positif pada levelling besaran PDRB. Pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian/agraris ke sektor industri ataupun perdagangan yang merupakan ciri spesifik dari daerah perkotaan.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Tabel 1.8 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Daerah	Realisasi Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	Lumajang	5,00	4,61	-2,79	3,14
		Jawa Timur	5,50	5,52	-2,33	3,57
		Indonesia	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2022 Katalog : 1102001.3508, Februari 2022 dan Berita Resmi Statistik No. 13/02/35/Th.XX, 7 Februari 2022, Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th.XXV, 7 Februari 2022.

Pada Tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang sebesar 5,00, masih berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 5,50 dan capaian Nasional sebesar 5,17. Sampai dengan Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, dimana nilai pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar -2,79 (minus). Begitu juga dengan capaian Jawa Timur sebesar -2,39 dan capaian Nasional sebesar -2,07. Untuk pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2021, capaian Kabupaten Lumajang nilainya mengalami pertumbuhan signifikan sampai dengan 3,14. Untuk Provinsi Jawa Timur nilainya juga mengalami pertumbuhan signifikan menjadi 3,57, begitu juga angka nasional mengalami pertumbuhan menjadi 3,69.

5) Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Lumajang terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Lumajang baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB perkapita secara rinci sebagai berikut:



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Tabel 1.9 PDRB Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021

No	PDRB per Kapita	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	ADHB	(miliar Rp)	30.695,97	32.691,10	32.062	33.678,32
2	ADHK	(miliar Rp)	21.574,22	22.603,33	21.933,8	22.628,4

Sumber : Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2022 Katalog : 1102001.3508, Februari 2022

Capaian kinerja dari sisi tingkat Pendapatan perkapita penduduk, berdasarkan PDRB ADHB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 mencapai 30.695,97 miliar rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 32.691,10 miliar rupiah di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 32.062 miliar rupiah di tahun 2020, untuk tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dengan capaian sebesar 33.678,32 miliar rupiah. Sedangkan, dengan menggunakan PDRB ADHK tingkat pendapatan perkapita penduduk tahun 2018 sebesar 21.574,22 miliar dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 22.603,33 miliar rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 21.933,8 miliar rupiah. Penurunan ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sector kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, untuk tahun 2021 mengalami kenaikan berkat program pemulihan ekonomi dengan capaian sebesar 22.628,4 miliar rupiah.

6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Semakin rendah mendekati nilai 0 (nol) yang berarti pemerataan semakin baik. Hasil analisis Indeks Gini disajikan dalam tabel sebagai berikut:



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Tabel 1.10 Indeks Gini Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Lumajang

Uraian	Satuan	Daerah	2018	2019	2020	2021
Indeks Gini	indeks	Lumajang	0,320	0,295	0,297	0,309
		Jawa Timur	0,380	0,360	0,370	0,364
		Indonesia	0,389	0,381	0,380	0,381

Sumber : Surat Kepala BPS Jawa Timur No. B-034/35520/VS.500/02/2022, 10 Februari 2022 dan Berita Resmi Statistik No. 08/01/Th.XXV, 17 Januari 2022, Berita Resmi Statistik No. 08/01/35/Th.XX, 17 Januari 2022.

Tren Indeks Gini di kabupaten Lumajang cenderung turun naik, pada tahun 2018 Indeks Gini Kabupaten Lumajang sebesar 0,320 turun menjadi 0,295 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 nilainya naik kembali dengan nilai 0,297, demikian juga untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,309, namun angkanya lebih baik dari pada nilai Indeks Gini nasional dan provinsi.



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- Pendidikan dasar;
- Pendidikan kesetaraan;
- Pendidikan anak usia dini.

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
I.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD,SMP)	100	2021
		Buku Teks Pelajaran	100	2021
		Perlengkapan Belajar	100	2021
		Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualitas S1/D-IV	100	2021
		Kualitas Tenaga Kependidikan (tenagaadmin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA sederajat	100	202
		Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	100	2021
		Satuan Pendidikan yang Berakreditasi minimal C	100	2021
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	100	2021
		Kualitas Pendidik yang Berkulifikasi S1/D-IV	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2021
		Modul Belajar	100	2021
		Perlengkapan Belajar	100	2021
		Jumlah Rombongan Belajar	100	2021
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	100	2021
		Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	100	2021
		Kualitas Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	100	2021
		Kualitas Tanaga Kependidikan (tenaga admin/tenagalab/admin) yang berkualifikasi SMA/ Sederajat	100	2021
		PKBM terakreditasi minimal C	100	2021
		3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Buku Gambar	100			2021
Alat Mewarnai	100			2021
Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	100			2021
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	100			2021
Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	100			2021
Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	100			2021
Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	100			2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD,SMP)	71.571	71.571	100
		Buku Teks Pelajaran	78.326	78.326	100
		Perlengkapan Belajar	156.652	156.652	100
		Kualitas Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualitas S1/D-IV	699	690	98.7
		Kualitas Kependidikan (tenagaadmin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA sederajat	1.051	804	76.49
		Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	4.733	4.733	100
		Satuan Pendidikan yang Berakreditasi minimal C	695	680	97.84
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	78.326	78.326	100
		Kualitas Pendidik yang Berkulifikasi S1/D-IV	6.821	6.470	94.85
		2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	798
Modul Belajar	5894			5894	100
Perlengkapan Belajar	11788			11788	100
Jumlah Rombongan Belajar	73			73	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	5.894			5.894	100
Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	187			146	78
Kualitas Kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	30			20	66.66



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus di layani	Jumlah yang terlayani	%
		Kualitas Tenaga Kependidikan (tenaga admin/tenagalab/admin) yang berkualifikasi SMA/ Sederajat	3	3	100
		PKBM terakreditasi minimal C	30	6	20
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	19.597	19.597	100
		Buku Gambar	246.096	246.096	100
		Alat Mewarnai	41016	41016	100
		Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	953	329	34.52
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	20.508	20.508	100
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	931	603	64.76
		Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3237	1715	52.98
		Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	1368	1368	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Capaian SPM 2021
			%	%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	83.90	100
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.69	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	141	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, pada jenis pelayanan pendidikan dasar mengalami kenaikan dari capaian 83,90% menjadi 100%. Kenaikan signifikan juga terjadi pada pelayanan pendidikan kesetaraan, yakni pada tahun 2020 hanya sebesar 2,69% menjadi 100% di Tahun 2021, hal tersebut merupakan dampak signifikan dari inovasi gempita desa yang dilakukan Kabupaten Lumajang mulai dari Tahun 2020 lalu, demikian juga pada capaian pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, yakni pada Tahun 2021 capaiannya sudah baik 100%. Namun bila dilihat dari pencapaian SPM dengan beberapa indikator penjas yang mendukung tercapainya 3 indikator utama SPM, maka Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 masih belum maksimal pada beberapa indikator diantaranya indikator akreditasi satuan pendidikan dan indikator kualifikasi tenaga kependidikan serta kualifikasi pendidik yang berijazah minimal S1/D.IV. ketiga indikator tersebut terus berproses untuk perbaikan kedepannya dengan tetap memperhatikan kekuatan anggaran di Kabupaten Lumajang.

4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44.472.756.922	42.863.152.394	96.38
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.360.000.000	1.360.000.000	100
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	195.000.000	195.000.000	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	397.765.000	397.765.000	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	95.000.000	95.000.000	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	912.570.000	911.670.800	99.95
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	14.000.000	14.000.000	100
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	24.990.000	24.990.000	100
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	19.378.328.000	18.955.366.000	97.82
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	48.679.000	48.679.000	100
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.046.424.922	20.860.681.594	94.62
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	130.117.974.709	125.686.794.632	96.59
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.950.000.000	1.950.000.000	100
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	524.989.563	481.097.830,41	91.64
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	854.036.148	719.499.800	84.25
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.532.437.300	8.020.957.453	84.14
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	136.836.500	134.880.000	98.57
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	550.000.000	550.000.000	100
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.608.349.315	3.401.089.650	94.26
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	45.491.799	44.107.350	96.96



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	68.361.500	68.394.000	??
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	328.029.600	256.152.946	78.09
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	37.989.526.100	36.528.746.500	96.15
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	165.894.050	154.602.050	93.19
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.315.422.834	73.328.667.054	98.67
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.600.000	48.600.000	100
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.574.138.387	67.429.223.514	96.92
	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.300.000.000	2.300.000.000	100
	Pembangunan Laboratorium	250.000.000	250.000.000	100
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	861.392.395	848.911.000	98.55
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.101.317.151	4.067.455.150	79.73
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	503.722.500	467.774.200	92.86
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	798.284.066	626.992.562	78.54
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.185.906.832	932.652.664	78.64
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.697.937	278.984.800	92.78



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	250.000.000	250.000.000	100
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	5.377.827.702	5.306.108.700	98.67
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	844.879.551	844.515.400	99.96
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	75.204.000	68.394.000	90.94
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.022.000	10.660.000	96.72
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	144.861.900	84.941.918	58.64
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.117.198.686	15.877.281.550	98.51
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	142.911.000	136.367.500	95.42
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35.308.912.667	35.078.184.070	99.35
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.408.713.600	6.392.377.300	99.75
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	72.513.600	56.527.300	77.95
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.336.200.000	6.335.850.000	99.99



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

5. Dukungan Personil

Keterangan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
Status kepegawaian			
- Pegawai negeri sipil (PNS)	1506	2001	3507
- Tenaga kontrak	49	26	75
Latar belakang pendidikan			
- Magister (S2)	40	43	83
- Sarjana (S1)	1.202	1793	2995
- Sarjana muda/Diploma III (D3)	19	19	36
- Sarjana muda/Diploma II (D2)	68	68	136
- Sarjana muda/Diploma I (D1)	-	-	-
- SLTA	132	77	209
- SLTP	38	1	39
- SD	7	-	7
Pangkat dan golongan			
- Pembina Utama (IV/e)		1	1
- Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1	2
- Pembina Utama Muda (IV/c)	21	31	52
- Pembina Tingkat I (IV/b)	473	597	1.070
- Pembina (IV/a)	190	130	320
- Penata Tingkat I (III/d)	105	136	241
- Penata (III/c)	133	157	290
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	165	351	516
- Penata Muda (III/a)	265	521	786
- Pengatur Tingkat I (II/d)	46	38	84
- Pengatur (II/c)	46	14	60
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	31	23	53
- Pengatur Muda (II/a)	10	-	10
- Juru Tingkat I (I/d)	18	1	19
- Juru (I/c)	-	-	-
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	2	-	2
- Juru Muda (I/a)	-	-	-
Pejabat struktural			
- Struktural	18	2	20



6. Permasalahan dan Solusi

1 PENGUMPULAN DATA

- Permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan data adalah data yang diambil dalam Dapodik adalah data mentah yang diolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Data ini belum melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil verifikasi dan validasi data pokok pendidikan oleh Kemendikbud akan dipublikasikan dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan April.

Solusi :

- Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang melaksanakan verifikasi dan validasi terkait data di Dapodik yang di input oleh lembaga pendidikan sebelum sinkronisasi oleh Kemendikbud. Data akan di update ketika data resmi dari Kemendikbud sudah di publikasikan

2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- Proses penghitungan kebutuhan khususnya pada kebutuhan minimal Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Solusi :

- Mengikuti perhitungan sesuai dengan Permendikbud No 32 Tahun 2018

3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Dalam Proses Perencanaan, indikator SPM Pendidikan masih belum tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan.
- Untuk penganggaran SPM sepenuhnya sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sudah mendukung SPM Pendidikan di Kabupaten Lumajang

Solusi :

- Indikator SPM dan IKK dimasukkan dalam proses perencanaan pada Perubahan Renstra



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

4 PELAKSANAAN

- Terkait kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan sudah tercukupi, khususnya tercukupi dengan tenaga honorer. Untuk kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ASN khususnya PPPK permasalahan yang adalah kendala dari anggaran daerah

Solusi :

- Dinas Pendidikan tetap mengusulkan formasi pendidik PPPK sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
-

5 Lain - Lain

- Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik khususnya dalam pemenuhan SPM Pendidikan, khususnya dengan program program strategis yang ada, seperti Gempita Desa dalam menjaring peserta didik kesetaraan, Program seragam gratis dalam menjaring peserta didik baru, dan program Stop DO No DO dalam mencegah angka putus sekolah. Akan tetapi program program strategis ini masih perlu di evaluasi dan di maksimalkan dalam pelaksanaannya di tahun mendatang agar lebih maksimal dalam pencapaian kinerja yang diharapkan

Solusi :

- Mengevaluasi dan mengoptimalkan program program strategis yang ada, dan menambah inovasi terkait pemenuhan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Lumajang.
-

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Vaksin Tetatus Difetri (Td)	100	2021
		• Tablet Tambah Darah	100	2021
		• Alat Deteksi resiko Ibu Hamil (tes kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Gol Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin)	100	2021
		• Kartu ibu / rekam Medis Ibu	100	2021
		• Buku KIA	100	2021
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Formulir Fotograf	100	2021
		• Kartu ibu / Rekam Medis Ibu	100	2021
		• Buku KIA	100	2021
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Vaksin Hepatitis B0	100	2021
		• Vitamin K1 Injeksi	100	2021
		• Salep / tetes Mata Antibiotik	100	2021
		• Formulir Bayi Baru lahir	100	2021
		• Formulir MTBM	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Kuisisioner Pra skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang Berlaku	100	2021
		• Formulir DDTK	100	2021
		• Buku KIA	100	2021
		• Vitamin A Biru	100	2021
		• Vitamin A Merah	100	2021
		• Vaksin Imunisasi Dasar (HB0,BCG, Polio,IPV, DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	100	2021
		• Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	100	2021
		• Jarum Suntik dan BHP	100	2021
		• Peralatan Anafilatik	100	2021
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Buku Rapor Kesehatanku	100	2021
		• Buku Pemantauan Kesehatan	100	2021
		• Kuisisioner Skrining Kesehatan	100	2021
		• Formulir Rekapitulasi hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah	100	2021
		• Formulir rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	100	2021
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		<ul style="list-style-type: none">• Pedoman dan Media KIE (alat ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol, KIT IVA Tes)	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100	2021
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Strip Uji Pemeriksaan (Gula Darah, Kolesterol)	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Instrumen Geriatric deression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien geriatri (P3G)	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Buku Kesehatan Lansia	100	2021
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Tensimeter	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	100	2021
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes <i>militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi si PTM	100	2021
		<ul style="list-style-type: none">• Pedoman dan Media KIE	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2021
		• Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia)	100	2021
		• Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	100	2021
		• Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	100	2021
		• Media KIE	100	2021
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner)	100	2021
		• Reagen Zn TB	100	2021
		• Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	100	2021
		• Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	100	2021
		• Catridge Tes Cepat Molekuler	100	2021
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan	100	2021
		• Pedoman/standar Operasional Prosedur	100	2021
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2021
		• Media KIE Berupa Lembar Baik, Leaflet, Poster Banner	100	2021
		• Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		<ul style="list-style-type: none"> Bahan Medis Habis Pakai (handschoen, Alkohol Swab, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai, Alat Tulis, Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 	100	2021

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
I.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	14.659	14.013	95.59
		<ul style="list-style-type: none"> Vaksin Tetatus Difetri (Td) 	14.659	14.013	95.59
		<ul style="list-style-type: none"> Tablet Tambah Darah 	14.659	14.013	95.59
		<ul style="list-style-type: none"> Alat Deteksi resiko Ibu Hamil (tes kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Gol Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin 	14.659	14.013	95.59
		<ul style="list-style-type: none"> Kartu ibu / rekam Medis Ibu 	14.659	14.013	95.59
		<ul style="list-style-type: none"> Buku KIA 	14.659	14.013	95.59



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	13.992	14.921	106.6
		• Formulir Fotograf	13.992	14.921	106.6
		• Kartu ibu / Rekam Medis Ibu	13.992	14.921	106.6
		• Buku KIA	14.659	14.921	101.7
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	13.326	13.666	102.5
		• Vaksin Hepatitis B0	13.326	13.666	102.5
		• Vitamin K1 Injeksi	13.326	13.666	102.5
		• Salep / tetes Mata Antibiotik	13.326	13.666	102.5
		• Formulir Bayi Baru lahir	13.326	13.666	102.5
		• Formulir MTBM	13.326	13.666	102.5
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	55.455	47.880	86.34
		• Kuisisioner Pra skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang Berlaku	55.455	47.880	86.34
		• Formulir DDTK	55.455	47.880	86.34



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		• Buku KIA	55.455	47.880	86.34
		• Vitamin A Biru	55.455	47.880	86.34
		• Vitamin A Merah	55.455	47.880	86.34
		• Vaksin Imunisasi Dasar (HB0,BCG, Polio,IPV, DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	55.455	47.880	86.34
		• Vaksin Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, HIB, Campak Rubella)	55.455	47.880	86.34
		• Jarum Suntik dan BHP	55.455	47.880	86.34
		• Peralatan Anafilatik	55.455	47.880	86.34
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	128.097	50.356	39.31
		• Buku Rapor Kesehatanku	128.097	50.356	39.31
		• Buku Pemantauan Kesehatan	128.097	50.356	39.31
		• Kuisoner Skrining Kesehatan	128.097	50.356	39.31
		• Formulir Rekapitulasi hasil	128.097	50.356	39.31



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam Sekolah			
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah 	128.097	50.356	39.31
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	669.386	432.295	64.53
		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Media KIE (alat ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol, KIT IVA Tes) 	50	8	16
		<ul style="list-style-type: none"> Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 	14	14	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan	166.727	120.024	71.99



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		layanan kesehatan			
		• Strip Uji Pemeriksaan (Gula Darah, Kolestrol)	166.727	120.024	71.99
		• Instrumen Geriatric deression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien geriatri (P3G)	166.727	120.024	71.99
		• Buku Kesehatan Lansia	166.727	120.024	71.99
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	282.769	123.648	43.73
		• Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	50	37	74
		• Tensimeter	67	66	98.51
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	14	14	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	21.751	24.703	113.5
		• Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	21.751	24.703	113.5
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi si PTM	21.751	24.703	113.5
		• Pedoman dan Media KIE	50	14	28
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.990	2.011	101
		• Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia)	22	11	50
		• Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	5	5	100
		• Penyediaan Formulir	83	72	86.75



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
		Pencatatan dan Pelaporan			
		• Media KIE	21	8	38.10
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	11.428	6.749	59
		• Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner)	58	58	100
		• Reagen Zn TB	11428	6749	59
		• Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	573759	573759	100
		• Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	59608	59608	100
		• Catridge Tes Cepat Molekuler	11428	6749	59
		• Formulir Pencatatan dan Pelaporan	4497	4497	100
		• Pedoman/standar Operasional Prosedur	52	52	100
12	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus	17.098	17.079	99.89



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang dilayani	%
	dengan risiko terinfeksi HIV	yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan			
		<ul style="list-style-type: none"> Media KIE Berupa Lembar Baik, Leaflet, Poster Banner 	23	23	100
		<ul style="list-style-type: none"> Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 	17.098	17.079	99.89
		<ul style="list-style-type: none"> Bahan Medis Habis Pakai (handschoen, Alkohol Swab, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai, Alat Tulis, Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 	17.098	17.079	99.89

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Capaian SPM 2021
			%	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	94.78	95,59
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	105.1	106,6



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Capaian SPM 2021
			%	%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	101	102,5
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,34
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	85.43	39,31
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	51.62	64,53
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	62.58	71,99
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	29.72	43,73
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	96.62	113,5
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	117.1	101
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	72.68	59
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	81.54	99,89

Sebagian besar capaian indikator SPM urusan Kesehatan sudah baik namun ada beberapa indikator yang memiliki nilai capaian yang masih rendah yaitu Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculosis. Hal ini di sebabkan pandemi covid 19 yang membatasi pertemuan tatap muka sehingga menyebabkan capaian



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

masih rendah, anak usia pendidikan dasar yang melakukan pembelajaran secara daring membuat petugas kesulitan untuk skrining kesehatan.

4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.645.771.112	4.679.292.116	70.41
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.381.230.450	962.484.200	74.79
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.866.657.762	2.375.963.676	43.47
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	273.788.200	209.282.200	44.71
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	426.333.500	288.166.000	45.85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	660.172.800	316.293.340	49.85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.385.000	27.385.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	323.767.200	159.437.500	49.24
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	151.557.500	71.687.500	47.30
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	147.262.500	69.722.500	47.34



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	44.880.000	23.505.000	52.37
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	273.829.000	150.985.200	55.13
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	68.907.200	24.380.000	35.38

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Tenaga
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter	77
		Dokter Gigi	33
		Perawat	507
		Bidan	381
		Ahli Gizi	47
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter	77
		Ahli gizi	47
		Bidan	381
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ahli Gizi	47
		Perawat	507
		Bidan	381
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	77
		Ahli Gizi	47
		Perawat	507
		Bidan	381
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter	77
		Kemas	45
		Perawat	507



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Tenaga
		Bidan	381
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dokter	77
		Kesmas	45
		Perawat	507
		Bidan	381
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter	77
		Kesmas	45
		Perawat	507
		Bidan	381
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter	77
		Kesmas	45
		Perawat	507
		Ahli Gizi	47
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus	Dokter	77
		Kesmas	45
		Perawat	507
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dokter	77
		Kesmas	45
		Perawat	507
		Ahli Gizi	47
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	Dokter	77
		Gizi	47
		Perawat	507
		Bidan	381
		Kesling	25
		Kesmas	45
12	Pelayanan Kesehatan orang Beresiko Terinfeksi HIV	Dokter	77
		Dokter Gigi	33
		Perawat	507
		Bidan	381
		Ahli Teknologi Lab Medik	29



6. Permasalahan dan Solusi

1 PENGUMPULAN DATA

- Jumlah logistik SPM yang banyak dan tersebar di 21 Puskesmas dan faskes milik pemerintah sehingga dibutuhkan waktu untuk perhitungan.

Solusi :

- Melakukan perhitungan logistik SOM per tribulan untuk memudahkan proses perhitungan di akhir tahun

2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- Pandemi covid membuat masyarakat takut untuk mengunjungi faskes yang mengakibatkan kesulitan menentukan target dan logistik pendukung SPM

Solusi :

- Melakukan pendataan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan

3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 sehingga mempengaruhi kegiatan lain termasuk SPM

Solusi :

- Membuat prioritas kegiatan pendukung SPM sesuai dengan anggaran yang tersedia

4 PELAKSANAAN

- Pandemi covid yang membatasi pertemuan tatap mukadan terjadi ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan capaian spm kurang maksimal

Solusi :

- Menggunakan telepon atau whatapps bagi warga masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah kesehatan

5 LAIN - LAIN

-

Solusi :

-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2021
		a. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	2021
		b. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	2021
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2021
		c. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	100	2021
		d. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan		
		e. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	100	2021

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.092.729	826.661	75.65
		Pelayanan SPAM jaringan perpipaan	1.092.729	689.150	63.07
		Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	551.639	137.511	24.93
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.092.729	332.150	30.40
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan	303.911	288.476	94.92



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha			
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	788.818	6.144	0.78
		Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	779.239	37.530	4.82

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Capaian SPM 2021
			%	%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	21,65	75,65
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3,3	30,40



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Sebagian besar capaian indikator SPM urusan Pekerjaan Umum meningkat signifikan, yakni pada pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada Tahun 2020 hanya sebesar 21,65% meningkat menjadi 75,65% di Tahun 2021, kemudian untuk pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik meningkat dari yang awalnya 3,3% menjadi 30,40% di tahun 2021. Hal tersebut merupakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dalam hal *updating* data capaian dan perbaikan instrumen perhitungan yang dipakai. Namun capaian indikatornya belum optimal mencapai 100% disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung pelayanan.

4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,991,987,650	6,959,179,033	99.53
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4,245,437,000	4,236,370,508	99.79
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2,437,887,150	2,431,680,708	99.75
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	116,482,500	105,079,817	90.21
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180,414,000	174,291,000	96.61
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	3,517,000	3,507,000	99.72



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	8,250,000	8,250,000	100
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17,636,581,574	16,244,685,576	92,1
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,035,490,274	3,920,909,024	97.16
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8,763,159,100	7,958,095,000	90.18
	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,416,500,000	1,413,053,000	99.76
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,337,082,200	1,878,018,732	80.36
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,062,550,000	1,054,609,820	99.25
	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	21,800,000	20,000,000	91.74

5. Dukungan Personil

1.	Status kepegawaian Bidang Cipta Karya	
-	Pegawai negeri sipil (PNS)	: 5 orang
-	Tenaga kontrak	: 17 orang



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Rincian pegawai		
- Kepala Bidang Cipta Karya	:	1 orang
- Kasi Penyediaan Air Bersih	:	1 orang
- Kasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	:	1 orang
- Kasi pengelolaan drainase	:	1 orang
- Kepala UPT PALD	:	1 orang
- Staf Penyediaan Air Bersih	:	4 orang
- Staf Pengelolaan Air Limbah Domestik	:	4 orang
- Staf UPT PALD	:	6 orang
- Staf Pengelolaan Drainase	:	3 orang

6. Permasalahan dan Solusi

1 PENGUMPULAN DATA

- Keterbatasan dana untuk melakukan survey rumah yg memiliki pengelolaan air limbah sehingga capaian tidak maksimal

Solusi :

- Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa melalui kecamatan untuk pendataan rumah yang memiliki pengelolaan air limbah domestik

2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- Kurang updatenya data rumah yg memiliki pengelolaan air limbah domestik sehingga kesulitan dalam menentukan target

Solusi :

- Melakukan update data rumah yg memiliki pengelolaan air limbah domestik sehingga mudah dalam menentukan target

3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Kurang atau minimnya dana dalam pelaksanaan kegiatan SPM

Solusi :

- Membuat priorotas kegiatan pendukung SPM sesuai dengan anggaran yang tersedia

4 PELAKSANAAN

- Ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal

Solusi :



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

- Menggunakan lahan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk pembangunan IPAL KOMUNAL

5 LAIN - LAIN

- Kesulitan mendapatkan data pelanggan air minum PDAM maupun yang dikelola masyarakat (PAMSIMAS)

Solusi :

- Meningkatkan Koordinasi dengan PDAM maupun PAMSIMAS untuk meningkatkan capaian SPM Air Minum

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2021
		a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
	korban bencana di kabupaten	• Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	100	2021
		b.		
		c. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	100	2021
		d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	2021
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2021
		e. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	100	2021
		f. Subsidi Uang Sewa	100	2021
		g. Penyediaan Rumah Layak Huni	100	2021

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	23	23	100
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	%
		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	23	23	100
		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	23	23	100
		Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0
		Subsidi Uang Sewa	0	0	0
		Penyediaan Rumah Layak Huni	23	23	100

4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.950.000	98.214.900	99.26
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.950.000	98.214.900	99.26
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	907.195.100	835.427.700	92.02



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Bencana atau Relokasi

Program Kabupaten/Kota

Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	104.690.000	103.176.200	98.55
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	802.505.100	732.251.500	91.25

5. Dukungan Personil

1. Status kepegawaian Bidang Kawasan Permukiman

- Pegawai negeri sipil (PNS)	:	6 orang
- Tenaga kontrak	:	16 orang
Rincian pegawai		
- Kepala bidang kawasan Permukiman	:	1 orang
- Kasi Penyediaan Rumah	:	1 orang
- Kasi perizinan perumahan dan tata bangunan	:	1 orang
- Kasi Permukiman	:	1 orang
- Staf Penyediaan rumah	:	6 orang
- Staf perizinan perumahan dan tata bangunan	:	7 orang
- Staf permukiman	:	5 orang

6. Permasalahan dan Solusi

1 PENGUMPULAN DATA

- Kurangnya koordinasi antara Dinas Perumahan dan BPBD tentang korban bencana sehingga kesulitan dalam pengumpulan data



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi antara dinas perumahan dan BPBD untuk keselarasan data korban bencana yg akan direlokasi maupun renovasi rumah

2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- Kesulitan dalam menentukan target karena harus menyesuaikan dengan kejadian bencana dan anggaran yang tersedia

Solusi :

- Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk menentukan target relokasi maupun renovasi korban bencana

3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Kurang atau minimnya dana dalam pelaksanaan kegiatan SPM

Solusi :

- Membuat prioritas kegiatan pendukung SPM sesuai dengan anggaran yang tersedia

4 PELAKSANAAN

- Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama untuk membawa material ke daerah yang sulit di jangkau

Solusi :

- Secara bertahap menganggarkan pengadaan kendaraan operasional agar dapat menjangkau daerah pelosok

5 LAIN - LAIN

- Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

Solusi :

- Melakukan Bimtek terhadap karyawan atau melakukan perekrutan tenaga ahli / Teknis

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100	2021
		a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100	2021
		b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100	2021
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100	2021
		c. Penegakan Perda sesuai SOP	100	2021
		d. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	100	2021
		e. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	100	2021
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	2021
		f. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		g. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100	2021
		h. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100	2021
		i. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100	2021
		j. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100	2021
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan korban bencana	100	2021
		k. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	2021
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2021
		l. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2021
		m. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100	2021
		n. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100	2021
		o. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		p. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	2021
		q. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	100	2021
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	2021
		r. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	100	2021
		s. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	100	2021

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	10	-	-
		a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	10	-	-
		b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	5	-	-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		pelayanan pengobatan			
2.	Pelayanan Ketentraman dan Keterlibatan Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	417	417	100
		c. Penegakan Perda sesuai SOP	417	417	100
		d. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	150	106	70.7
		e. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	71	71	100
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1091856	844930	77.4
		f. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	21	21	100
		g. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	10	10	100
		h. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1091856	392214	35.9
		i. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	3300	3300	100
		j. Pengadaan dan pemasangan rambu	540	540	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana			
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan korban bencana	1091856	858089	78.6
		k. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1091856	858089	78.6
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36544	36544	100
		l. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36544	36544	100
		m. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	36474	36474	100
		n. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	7	7	100
		o. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	100
		p. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2	2	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		q. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	612	612	100
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	40	49	122.5
		r. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	40	49	122.5
		s. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	-	-	-

4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.438.949.000	5.408.694.000	97.48



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	340.425.000	340.358.000	99.64
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1.935.950.000	1.911.444.000	86,19
	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	288.021.250	287.588.000	99.84
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	21.862.500	21.600.500	98.8
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia	14.645.000	14.645.000	100
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2.838.045.250	2.833.058.500	99.82



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	Penegakan Peraturan Daerah			
	Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	894.568.000	873.231.110	97.61
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	503.988.000	489.786.860	97.18
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	243.320.500	242.292.750	99.58
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	47.645.000	45.099.000	94.66
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / kota	602.246.860	601.516.500	99.89
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	523.528.000	523.359.000	99.97
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri	78.718.860	78.157.500	99.29
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	3.792.000	3.307.000	87.20
	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	3.792.000	3.307.000	87.20



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	869.895.000	867.064.350	99.67
	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kab / Kota	750.000	727.500	97
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	187.808.000	185.640.000	98.84
	Pengelolaan risiko bencana Kab / Kota	21.150.000	20.400.000	96.45
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	28.350.000	28.350.000	100
	Penanganan Pasca Bencana Kab / Kota	57.502.000	55.795.000	97.03
	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab / Kota	44.850.000	38.725.000	86.34
	Penyusunan Rencana Kontijensi	750.000	727.500	97
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.933.189.151	1.756.886.900	90.88
	Respon cepat darurat bencana Kab / Kota	1.019.172.011	1.002.851.500	98.39
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	50.408.000	50.260.000	99.70
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	705.053.140	545.585.400	77.38
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit	158.556.000	158.190.000	99.76



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

5. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	39	Orang
	Tenaga kontrak	165	Orang
Bidang	Perlindungan Masyarakat	16	Orang
	Penegakan Perda	11	Orang
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	152	Orang
	Pemadam Kebakaran	24	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	16	Orang
	Tenaga kontrak	50	Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	2	Orang
	Golongan II	5	Orang
	Golongan III	7	Orang
	Golongan IV	2	Orang
Lain-lain	TRC OPD	25	Orang
	Relawan	30	Orang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

6. Permasalahan dan Solusi

1 PENGUMPULAN DATA

- Keterlambatan penyampaian laporan kegiatan yang dilaksanakan, hal ini disebabkan petugas yang mempunyai tugas rangkap apabila dalam waktu bersamaan dituntut untuk menyelesaikan tugas lain
- Dokumen Kajian Resiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Belum di review

Solusi :

- Diperlukan penambahan personil di Satpol PP yang berkompeten dalam administrasi dalam pelaporan kegiatan
- Meningkatkan Kordinasi internal dan Lintas Instansi Terkait untuk pengoptimalan pengumpulan data

2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- Jumlah personil dalam melakukan pelayanan masih di nilai kurang memadai



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

-
- Perlunya Penambahan Sarana dan Prasarana yang di gunakan untuk Kegiatan Pemantauan ke Wilayah Rawan Bencana

Solusi :

-
- Diperlukan penambahan personil di Satpol PP yang berkompeten
 - Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang sudah tersedia

3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Capaian SPM Bidang Trantibum Tahun 2021

- Jumlah warga yang mendapat pelayanan ganti rugi material akibat dampak penegakan perda dan perkara target untuk tahun 2021 sebanyak 10 orang namun anggaran ini tidak masuk di RKA tahun 2021 karena anggaran tidak mencukupi sehingga realisasi pada sub. Kegiatan tersebut 0 (Nihil).
- Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pengobatan akibat dampak penegakan perda dan perkara target tahun 2021 sebanyak 5 orang namun anggaran ini tidak masuk di RKA tahun 2021 karena anggaran tidak mencukupi sehingga realisasi pada sub. Kegiatan tersebut 0 (Nihil).

2. Penempatan Pos Damkar sementara ini masih berpusat di posko Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk di wilayah Kecamatan / Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK):

- Kami belum bisa menempatkan pos pemadam kebakaran di tingkat Kecamatan / Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) karena belum terbaginya Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) dan masih keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
 - Untuk aparatur pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas pelaksanaannya secara bergantian 2 shift, 1 shift sama dengan 12 jam
 - Sesuai Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pada Bab IV Pasal 21 dan Bab V pasal 27 Poin C Relawan pemadam Kebakaran di tiap – tiap Desa sudah terploting di dalam Permendagri tersebut, yang selanjutnya relawan
-



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

dimasing-masing Desa tersebut menjadi binaan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Lumajang

3. Terbatasnya Anggaran untuk Pelaksanaan Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Solusi :

1. Dalam perencanaan ditahun berikutnya perlu penambahan anggaran guna mencukupi kegiatan SPM
2. Membentuk relawan dari anggota Linmas yang ada di tiap-tiap Desa
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan Program dan Kegiatan

4 PELAKSANAAN

- Tidak ada PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sehingga menghambat pelaksanaan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggar Perda yang ada di Kabupaten Lumajang
- Perlunya Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat dalam mengantisipasi Penanggulangan Bencana
- Adanya keterbatasan kemampuan dan jumlah personil dalam penanganan bencana sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan bagi personil dalam penanggulangan bencana

Solusi :

- Merencanakan Penambahan Personil Satpol PP Kabupaten Lumajang untuk mengikuti pendidikan PPNS.
- Dalam perencanaan ditahun berikutnya perlu penambahan anggaran guna mencukupi kegiatan SPM
- Perlu adanya protap dalam hal penanggulangan bencana dalam hal skala prioritas penanggulangan bencana
- Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat dan generasi muda yang berada di daerah rawan bencana
- Pembinaan atau pelatihan kesiapsiagaan bencana alam terhadap perangkat dan aparat desa serta tingkat kecamatan dan kabupaten

5 Lain - Lain



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

- Belum di tetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Tingkat kabupaten
- Belum disusunnya 8 (delapan) Rencana Kontijensi Bencana Alam dan Bencana Non Alam (Pandemi)

Solusi :

- Peningkatan koordinasi dengan lintas sector terkait dalam penanggulangan bencana
- Memperluas jaring informasi dalam bidang penanggulangan bencana
- Penggalangan relawan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

F. URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
I.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2021
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah memiliki	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Kendaraan Khusus Layanan rehabilitasi social dasar diluar panti		
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2021
		Penyediaan Permakanan	100	2021
		Penyediaan Sandang	100	2021
		Penyediaan Alat Bantu	100	2021
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2021
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	100	2021
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	100	2021
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2021
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2021
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100	2021
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2021
		Layanan Rujukan	100	2021
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2021
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2021
		Penyediaan Permakanan	100	2021
		Penyediaan Sandang	100	2021
		Penyediaan Alat Bantu	100	2021
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2021
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual & Sosial	100	2021
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100	2021
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2021
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2021
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	100	2021
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2021
		Layanan Rujukan	100	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2021
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	2021
		Penyediaan Permakanan	100	2021
		Penyediaan Sandang	100	2021
		Penyediaan Alat Bantu	100	2021
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2021
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100	2021
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	100	2021
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2021
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100	2021
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100	2021
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2021
		Layanan Rujukan	100	2021
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	2021
		Layanan Data dan Pengaduan	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
	dan pengemis di luar panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	100	2021
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	100	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	100	100
		Penyediaan Permakanan	100	100
		Penyediaan Sandang	100	100
		Penyediaan Alat Bantu	100	2021
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	100	2021
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	100	2021
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	100	2021
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100	2021
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2021
		Pemberian Pelayanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	100	2021
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	2021
		Layanan Rujukan	100	2021
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	2021



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
	paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Penyediaan Permakanan	100	2021
		Penyediaan Sandang	100	2021
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100	2021
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100	2021
		Pelayanan Dukungan Psikososial	100	2021

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
I.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	5347	5.119	96
		Layanan Data dan Pengaduan	7	7	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah memiliki Kendaraan Khusus Layanan rehabilitasi social dasar diluar panti	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	1	1	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi	1	1	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru			
		Penyediaan Permakanan	5.347	2.597	49
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat Bantu	8	8	100
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	8	8	100
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	5.347	5.119	96
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	23	23	100
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	15	15	100
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	4.298	4.928	100
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	23	23	100
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	23	23	100
		Layanan Rujukan	15	15	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2658	2658	100
		Layanan Data dan Pengaduan	7	7	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	100
		Penyediaan Permakanan	2627	616	23
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	31	31	100
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual & Sosial	2658	2658	100
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	31	31	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Disabilitas Anak Terlantar			
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2658	2658	100
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2658	2658	100
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	31	31	100
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31	31	100
		Layanan Rujukan	2627	2627	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	110202	105974	96
		Layanan Data dan Pengaduan	7	7	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	1	1	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	100
		Penyediaan Permakanan	110184	46829	43
		Penyediaan Sandang	18	18	100
		Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	18	18	100
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1100202	105974	96
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	18	18	100
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	18	18	100
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	110202	81546	74
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	18	18	100
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18	18	100
		Layanan Rujukan	18	18	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan	23	23	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
	khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
		Layanan Data dan Pengaduan	7	7	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	100
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	1	1	100
		Penyediaan Permakanan	23	23	100
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	23	23	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian		
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	%
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	23	23	100
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	23	23	100
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	23	23	100
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	23	23	100
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13	13	100
		Layanan Rujukan	10	10	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2942	2942	100
		Penyediaan Permakanan	10084	10084	100
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	6	6	100
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	16.837	16.837	100
		Pelayanan Dukungan Psikososial	10.084	10.084	100



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Capaian SPM 2021
			%	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	95.12	96
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	28.17	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	12.99	96
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	8.8	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	38.11	100

Dinas Sosial belum memiliki kendaraan khusus untuk layanan kedaruratan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di luar panti, sehingga sampai saat ini masih menggunakan kendaraan operasional kantor di dalam pelayanan kedaruratan untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti. Hal inilah yang menyebabkan capaian SPM yang tersaji 0%. Tetapi pelayanan kedaruratan untuk disabilitas di luar panti tetap terlaksana dengan menggunakan kendaraan operasional kantor. Untuk indikator pemberian sandang dan alat bantu bagi anak terkantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti capaiannya 0% karena penyediaan alat bantu hanya diperuntukkan untuk disabilitas, dan penyediaan sandang hanya untuk lansia terlantar. Hal tersebut dikarenakan anak terlantar yang mendoatkan rehabilitasi sosial tidak memerlukan alat bantu dan sandang. kendaraan khusus untuk layanan kedaruratan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar sampai saat ini masih menggunakan kendaraan operasional kantor karena dinas



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

sosial belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan lansia terlantar. Hal inilah yang menyebabkan capaian SPM yang tersaji 0%. Sementara untuk penyediaan alat bantu sampai saat ini juga masih dialokasikan hanya untuk disabilitas terlantar. Dalam pemberian layanan untuk tuna sosial tidak menyediakan alat bantu dan sandang. Hal ini dikarenakan gepeng/tuna sosial yang tertangani dalam kondisi normal (tidak membutuhkan alat bantu). Sementara untuk penyediaan sandang hanya diperuntukkan lansia terlantar. Dalam penanganan korban bencana Dinas Sosial hanya bertugas dalam hal penyediaan permakanan dan dukungan psikososial.

4. Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang Disabilitas terkantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan, pengemis	247.917.750	235.811.600	95.11
	Penyediaan Permakanan	207.740.000	202.059.400	97.27
	Penyediaan Sandang	25.903.200	25.903.200	100
	Pemberian Layanan Kedaruratan	8.047.700	7.848.700	97.51
	Penyediaan Alat Bantu	6.225.150	6.225.150	100

5. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	18	Orang
	Tenaga kontrak	30	Orang
Jumlah total		48	Orang
	Struktural	12	Orang
	Pelaksana	6	Orang
Bidang Pelayanan dan rehabilitasi sosial		10	Orang
Bidang Pemberdayaan Sosial		13	Orang
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		9	Orang



6. Permasalahan dan Solusi

1 PENGUMPULAN DATA

- Kurangnya sumber daya manusia/aparatur yang berkompeten dalam upaya percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pengumpulan data SPM

Solusi :

- Dilakukan penambahan personil di Dinas Sosial yang berkompeten dalam mendukung percepatan SPM dan pengumpulan data SPM

2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron untuk penanganan kemiskinan sehingga sulit menentukan target SPM

Solusi :

- Melakukan komunikasi dengan pihak Desa melalui Kecamatan agar pendataan dan perubahan DTKS betul betul obyektif

3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Kurang atau minimnya dana dalam pelaksanaan kegiatan

Solusi :

- Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal

4 PELAKSANAAN

- Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional

Solusi :

- Secara bertahap menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional

5 LAIN - LAIN

- Shelter Sosial belum memfasilitasi seluruh jenis dan kuota PMKS

Solusi :

- Di usulkan untuk pembangunan rumah singgah pada anggaran tahun berikutnya



BAB III

HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EKPPD TAHUN 2021

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Tahun 2021 atas LPPD Tahun 2020 sampai dengan saat ini belum ada *realese* resmi dari Kementerian Dalam Negeri, namun untuk capaian Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 masih tetap menjadi acuan kami untuk memprediksi capaian hasil EKPPD Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2019 dan EKPPD Tahun 2021 atas LPPD Tahun 2020.

capaian Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120.04/3545/SJ Tanggal 08 Mei 2019 tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

Tataran Pengambil Kebijakan

Penilaian indeks capaian kinerja terhadap Tataran pengambil kebijakan, yakni Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada Tataran pelaksana Kebijakan Daerah, yakni kinerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek dengan 43 indikator kinerja kunci (IKK). Penilaian pada tataran pengambil kebijakan mendapatkan 3,6450 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH IKK	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	34	79,07
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	2	4,65
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	6	13,95
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	1	2,33
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
Jumlah	43	100,00

1. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran pelaksana kebijakan daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada tataran pelaksana kebijakan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

daerah mendapatkan skor 3,1233 atau dengan kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

a) Aspek Administrasi Umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup 23 Urusan wajib dan 6 urusan pilihan dengan jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada aspek umum mendapatkan skor 3,0312 atau dengan kategori prestasi Tinggi dengan Rincian sebagai berikut :

1) Skor dan Prestasi per Aspek

NO	URAIAN	SKOR	PRESTASI
1	Kebijakan teknis penyelenggaraan	2,9265	T
2	Ketaatan terhadap peraturan / Undang-undang	3,5294	ST
3	Penataan Kelembagaan	2,5735	T
4	Pengelolaan Kepegawaian	3,1882	ST
5	Perencanaan pembangunan	3,5294	ST
6	Pengelolaan keuangan	2,0912	T
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,5294	ST
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	3,2000	ST

2) Skor dan Prestasi per IKK

URAIAN	JUMLAH	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	470	74,60
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	24	3,81
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	25	3,97
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	111	17,62
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena bukan urusan pilihan	0	0
Jumlah	630	100,00

3) Skor dan prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada urusan : Sosial yaitu sebesar 3,8095.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

- Skor terendah dengan prestasi Rendah terdapat pada urusan Transmigrasi yaitu sebesar 2,9524.

b) Urusan Pemerintahan

Usuran pemerintahan terdiri dari 23 Urusan Wajib, 6 urusan Pilihan dan fungsi penunjang Pemerintahan Umum

Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor 3,1847 atau mendapat kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

1) Urusan Wajib dan Fungsi Penunjang

Usuran wajib dan Fungsi Penunjang secara keseluruhan memperoleh skor 3,1371 dengan kategori prestasi Sangat Tinggi. Hasil evaluasi atas 23 urusan wajib sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	11	45,82
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	10	41,67
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	1	4,17
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	1	4,17
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0
FP yang memperoleh kategori sangat tinggi	1	4,17
Jumlah	24	100,00

Skor dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada 4 (empat) urusan dengan nilai skor tertinggi yaitu 4,0000 ada pada urusan : penanaman Modal, ketenagakerjaan, Perhubungan, dan statistik
Skor dengan prestasi Rendah terdapat pada 1 (satu) urusan dengan nilai skor terendah 1,0000 ada pada urusan kepemudaan dan olahraga.

Dari 23 urusan wajib terdapat 6 (enam) urusan wajib yang kinerjanya merupakan pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, hasil capaian kinerja 6 urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SKOR	PRESTASI
1	Pendidikan	3,4000	ST
2	Kesehatan	3,1250	ST
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	2,6000	T
4	Perumahan Rakyat dan Permukiman	3,6663	ST
5	Sosial	3,6663	ST



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

6	Trantibum dan Linmas	2,0000	S
---	----------------------	--------	---

2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) urusan dan mendapatkan skor 3,3750 dengan kategori prestasi Tinggi. Hasil evaluasi atas 6 urusan pilihan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	4
UP yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	2
UP yang memperoleh kategori prestasi Sedang	0
UP yang memperoleh kategori prestasi Rendah	0
UP yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0
Jumlah	6

Skor tertinggi sebesar 4,0000 dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada 1 (satu) urusan yaitu Kelautan dan Perikanan dan Transmigrasi
Skor terendah sebesar 2,5000 dengan prestasi sedang terdapat pada urusan Pariwisata

2. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor 4,0000

3. Kesimpulan EKPPD Kabupaten Lumajang

Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 21 (dua puluh satu) dari 38 Kabupaten/Kota dengan skor 3,3033 atau dengan **kategori prestasi Sangat Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Dok Kominfo

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2021, realisasi opini BPK terhadap LKPD Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan untuk LKPD Tahun 2021 masih belum dapat disajikan, karena opini BPK terhadap LKPD biasanya terbit pada bulan Mei tahun anggaran berikutnya. Hal ini memotivasi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dapat mempertahankannya untuk LKPD tahun 2021, sehingga data sementara untuk capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah pada indikator Opini BPK terhadap LKPD kami isikan WTP atau tercapai 100%, sehingga prediksi 4 Tahun berturut-turut pada Tahun RPJMD 2018-2023 Opini yang diperoleh adalah WTP dan capaian kinerjanya 100%

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Optimalnya Sistem Informasi Penyusunan APBD :



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

- Terintegrasinya SIP-APBD dengan E-Planning
 - Aplikasi Standart Biaya / Standart Harga yang sudah terintegrasi dengan SIP-APBD
 - 2. Optimalnya SIPKD penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah :
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur pengguna SIPKD
 - Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet
 - Optimalnya pemanfaatan IT dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan.
 - 3. Penerbitan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Optimalnya peran Tim Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap untuk melakukan koordinasi, inventarisasi dan validasi data aset tetap.
 - Terlaksananya penelusuran bukti kepemilikan aset tetap.
 - Terlaksananya pensertifikatan tanah secara bertahap.
 - Inventarisasi dan validasi aset tetap
- Pengelolaan BMD berbasis IT/ SIMBADA



BAB IV
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2021 senantiasa menganut prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah agar dapat terjaga kesinambungan dan keterpaduan program-program yang telah direncanakan. Realisasi APBD Tahun anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya daalaam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.



Diagram 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021



Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2021 LRA
unaudited BPK cutt off tanggal 07 Februari 2022

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang berasal dari selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disajikan secara rinci pada diagram 4.1 sebagai berikut:

Dari diagram disamping, tampak bahwa Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah Kabupaten Lumajang yang terbesar yaitu menunjang sebesar 79%. Pendapatan transfer terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Dari ketiga unsur tersebut, realisasi yang paling besar adalah Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	304.209.601.165,00	325.046.492.762,36	106,85
	Pendapatan Pajak Daerah	90.415.000.000,00	81.665.216.472,00	90,32
	Pendapatan Retribusi Daerah	37.878.290.280,00	32.014.323.150,50	84,52
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.847.114.298,00	4.711.388.731,48	68,81
	Lain-lain PAD yang Sah	169.069.196.587,00	206.655.564.408,38	122,23
2.	Pendapatan Transfer	1.653.161.870.723,00	1.710.494.353.637,14	103,47
	Dana Perimbangan	1.284.076.440.566,00	1.290.927.288.514,00	100,53
	Dana Penyesuaian	242.440.169.000,00	242.064.327.200,00	99,84
	Transfer dari Pemerintah Provinsi	126.645.261.157,00	177.502.737.923,14	140,16
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	130.370.284.000,00	126.339.589.841,91	96,91
	Pendapatan Hibah	37.197.849.000,00	13.711.185.326,00	36,86
	Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan)	93.172.435.000,00	112.628.404.515,91	120,88
	Jumlah	2.087.741.755.888,00	2.161.880.436.241,41	103,55

Sumber : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2021, unaudited BPK cutt off tanggal 07 Februari 2022

2) Realisasi belanja menurut jenis belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, bahwa Belanja Daerah Kabupaten Lumajang teranggarkan sebesar Rp 2.046.075.099.752,00 dengan besaran realisasi Rp



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

1.790.524.598.869,59 atau sebesar 87,51%. Menurut jenisnya, Belanja Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, antara lain Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 digambarkan sebagaimana tabel 1.5 dibawah ini:

Diagram 4.2
Rincian Target dan Realisasi
Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2021



Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2021 LRA unaudited BPK cutt off tanggal 07 Februari 2022

Dari diagram 4.2 disamping, tampak bahwa realisasi belanja daerah yang terbesar adalah digunakan untuk belanja operasi dengan capaian sebesar 87% dari total realisasi belanja daerah. Adapun belanja operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial. Dan Belanja Pegawai merupakan jenis belanja operasi dengan jumlah realisasi terbesar mencapai 51% dari total belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp 801.049.030.923,46 dari target sebesar Rp 820.198.771.017,00.

Berikut disajikan tabel 1.8 yang berisi rincian, target, dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rincian Target Dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	820.198.771.017,00	801.049.030.923,46	97,66
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	466.359.444.708,00	461.009.064.542,00	98,9
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	55.677.754.350,00	54.909.742.167,00	98,6
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	189.968.313.021,00	178.813.047.179,00	94,1
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.756.837.500,00	30.726.516.690,00	99,9
	Belanja Gaj dan Tunjangan	167.674.123,00	167.524.440,00	99,9



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Kepala/Wakil Kepala Daerah			
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala/Wakil Kepala Daerah	993.120.000,00	993.120.000,00	100,0
	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0
	Belanja Pegawai BLUD	76.275.627.315,00	74.430.015.905,46	97,6
2.	Belanja Barang dan Jasa	643.065.430.244,00	554.443.294.315,26	86,22
	Belanja Barang	97.684.570.028,00	75.464.946.633,80	77,25
	Belanja Jasa	271.569.033.995,00	235.782.266.284,00	86,82
	Belanja Pemeliharaan	23.167.844.649,00	21.232.869.064,00	91,65
	Belanja Perjalanan Dinas	45.916.537.519,00	35.066.051.253,00	76,37
	Belanja Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.803.518.800,00	10.445.492.500,00	62,16
	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.219.764.121,00	81.857.099.129,46	99,56
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.704.161.132,00	94.594.569.451,00	89,49
3.	Belanja Bunga	1.251.861.110,00	443.723.013,00	35,45
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.251.861.110,00	443.723.013,00	35,45
4.	Belanja Hibah	175.281.397.312,00	170.677.851.768,57	97,37
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.934.321.860,00	1.720.565.200,00	88,95
	Belanja Hibah kepada BUMN	773.041.480,00	767.096.600,00	99,23
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	171.504.206.624,00	167.120.362.620,57	97,44
	Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	1.069.827.348,00	1.069.827.348,00	100,00



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.	Belanja Bantuan Sosial	30.098.300.000,00	29.713.137.500,00	98,72
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.763.200.000,00	11.528.300.000,00	98,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	115.500.000,00	115.237.500,00	99,77
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	14.047.000.000,00	13.947.000.000,00	99,29
	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, keagamaan, dan Bidang Lainnya)	4.172.600.000,00	4.122.600.000,00	98,80
	Jumlah	1.669.895.759.683,00	1.556.327.037.520,29	93,20

Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2021 LRA unaudited BPK cutt off tanggal 07 Februari 2022

3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebesar Rp 221.765.999.960,33 atau sebesar 69,48% dari target sebesar Rp 319.159.279.260,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp500.000.000,00 dan terserap 100% dari target. Adapun rincian target dan realisasi masing-masing jenis pembiayaan sebagaimana tersaji dalam tabel 1.11 berikut :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Penerimaan Pembiayaan	319.159.279.260,00	221.765.999.960,33	69,48
	Penggunaan SILPA	178.659.279.260,00	178.659.279.260,33	100,00
	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	140.000.000.000,00	41.730.007.100,00	29,81



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	500.000.000,00	1.376.713.600,00	275,34
2.	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	318.659.279.260,00	221.265.999.960,33	69,44

Sumber Data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2021 LRA unaudited BPK cutt off tanggal 07 Februari 2022

4). Permasalahan Pendapatan Daerah

Secara umum permasalahan pendapatan yang terjadi di daerah adalah :

- a) Belum lengkapnya data base tentang pajak dan retribusi daerah;
- b) Kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal:
 - Tidak tertibnya penggunaan benda berharga dari SKPD Penghasil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk memungut retribusi daerah;
 - Terlambatnya cetak benda berharga sangat berpengaruh terhadap pemungutan retribusi daerah, sehingga berpengaruh terhadap kurang tertibnya administrasi.
- c) Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (Penegak Perda);
- d) Kurangnya koordinasi Internal dengan unit kerja yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah :
 - Belum maksimalnya pengurusan IMB yang dilimpahkan dari dinas PU ke kecamatan.
- e) Belum optimalnya tingkat pengendalian (belum terbangunnya sistem on line yang terintegrasi antara SKPD Penghasil dengan DPMPST selaku penerbit ijin;
- f) Keterbatasan Kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi daerah dalam bidang pekerjaannya.

5). Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

2. Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi untuk meningkatkan fungsi koordinasi;
3. Sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah.

6). Permasalahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja yang terjadi di daerah adalah

- a. Realisasi belanja SKPD tidak sesuai target;
- b. Penyerapan realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan.

7). Solusi

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Evaluasi secara rutin penyerapan anggaran oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).

8). Permasalahan pembiayaan

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup devisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup devisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan daerah.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

BAB V
INOVASI DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Daftar Inventarisasi Judul Program Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021

No	Judul Inovasi	Urusan Pemerintah
1	SIMIN	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
2	GERDU SEJIWA (Gerakan Terpadu Kesehatan Jiwa)	kesehatan
3	Menurunkan Jumlah Keterlambatan Peserta Dalam Menghadiri Rapat Melalui Pemberian Perlakuan Khusus bagi Peserta Yang Datang Terlambat	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH (E-POTENSI)	Keuangan
5	PAGI BERSERI (Pagelaran Aksi Sekolah Sehat Asri)	kesehatan
6	NGAPLING (NGASPAL KELILING)	pekerjaan umum dan penataan ruang



No	Judul Inovasi	Urusan Pemerintah
7	POP KU ANTI COVID-19 (Menurunkan Waktu Antri Pasien di Ruang Pendaftaran Puskesmas Kunir Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19)	kesehatan
8	INCAR (IRIGASI LANCAR)	pekerjaan umum dan penataan ruang
9	PASIR RIMAH (Pendaftaran Pasien Rawat Jalan dari Rumah)	kesehatan
10	Gebrakan SUSI PASTI (Suami Siaga, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi) - Turunkan Kematian Ibu dan Bayi serta Kasus Stunting, Lahirkan Generasi Sehat Berkualitas	kesehatan
11	SiDeRA (Stimulasi Deteksi Dini dan Ramah Anak)	kesehatan
12	KMPK (Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan)	kesehatan
13	GULA TEBU (Gerakan Ubah Lama Waktu Tunggu Pasien Berobat Terpadu).	kesehatan
14	KARISMA KUAT (Kunjungan Rumah, Intervensi, dan Pembinaan Keluarga sehat)	kesehatan
15	DOKTER MUTER (Dekat Oleh Dokter dan tenaga kesehatan lainnya Melalui Pelayanan Terpadu)	kesehatan
16	GEDANG MESEM (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat)	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
17	BISMA KUAT (Basiswa Mahasiswa Super Smart)	pendidikan
18	SIPERLU	Kepegawaian
19	MANTUN	Kepegawaian
20	SI TPP	Kepegawaian
21	Buku Harian Anak TERHEBAT (Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat)	pendidikan,kesehatan
22	E Berkala	Kepegawaian
23	E Pangkat	Kepegawaian
24	SIPIR (Sistem Inovasi Pinjam Ruangan)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25	Program Pelayanan Informasi Kehilangan	komunikasi dan informatika



No	Judul Inovasi	Urusan Pemerintah
26	TCAK TIMBUL (Tukang Cek Akurasi dan Timbangane Uwong Lumajang)	perdagangan
27	SEGAR BERDAYA (Sehat Bugar Bersih, Selalu Waspada dan Siap Berkarya)	kesehatan
28	GEMA KURU (Gerakan Bersama Kunjungan Rumah)	kesehatan
29	TAWES SEHAT (Test Alr melalui Webite dan whatsapp secara mudah, praktis, dan cepat)	kelautan dan perikanan
30	CETAR (Cekatan Tandur nang Latar)	pangan
31	SIP BOS (Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Online Sistem)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
32	SPIKER (STICKER PENGINGAT KEUR)	perhubungan
33	ORTRATA (Olahraga di Tempat Wisata)	kepemudaan dan olah raga
34	SiPORA (Elektronik Pemuda dan Olahraga)	kesehatan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik
35	PARAMITA (Pasar Rakyat Milik Kita)	perdagangan
36	PAMERAN VIRTUAL	perdagangan
37	ANTI SELIR (ANTAR SANTUNAN KEMATIAN SEHARI LANGSUNG CAIR)	sosial
38	TAJEK	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
39	JEBOL DACIL (Jemput Bola Daerah Terpencil)	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
40	PENGIN KETUPAT DI YOSOWILANGUN	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
41	SANTIBAMA	sosial
42	IREK TAJAM (IZIN REKLAME SETENGAH JAM)	penanaman modal
43	JEBOL SANTI	sosial
44	BCA (Berkas Cukup WA)	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
45	E-LACAK	penanaman modal
46	LAGAKITA (Lahir Gratis Dapat Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran)	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
47	SIPALUKU (Sistem Integrasi Data Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dengan Data Kependudukan)	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Judul Inovasi	Urusan Pemerintah
48	LANDUK TAMAT (Pelayanan Tuntas Administrasi Kependudukan di Kecamatan)	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
49	PANADDOL MANTAP COVID-19 (Pelayanan Adminduk Online Melalui Aplikasi Whatsapp)	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
50	ABG (ANGKUTAN BUS GRATIS) BAGI PELAJAR	perhubungan
51	APUKAT Ranuyoso	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
52	SI CEPAD SAKTI (Aksi Percepatan Penyaluran Dana Santunan Kematian)	sosial

Sumber : Bappeda, data untuk inovasi Tahun 2021

Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Lumajang atas inovasi pelayanan publik nya adalah sebagai berikut :

No	Nama Penghargaan	Diterima Pada
1.	Penghargaan Implementasi Satu Data Indonesia	19 Maret 2021
2.	penghargaan SAKIP Award dengan predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	22 April 2021
3.	Penghargaan Manggala Karya Kencana Bagi Gubernur/Bupati/Walikota	29 Juni 2021
4.	Penghargaan Bangga Kencana Kesehatan kategori Pelaksana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat provinsi	14 Oktober 2021
5.	penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU) Bidang Metrologi Legal, tera ulang oleh Menteri Perdagangan RI	28 Oktober 2021
6.	Juarai tiga kategori dalam ajang MTQ XXIX Jawa Timur 2021	11 November 2021
7.	penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Kategori Umum Jawa Timur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo	20 November 2021
8.	Penghargaan BKN Award 2021	27 November 2021



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

No	Nama Penghargaan	Diterima Pada
9.	Penghargaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-XXIX Tingkat Provinsi Jawa Timur	29 November 2021
10.	Penghargaan implementasi <i>Integrated Area Development</i> (IAD) berbasis perhutanan sosial	28 Desember 2022
11.	Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa dari Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi	29 Desember 2021

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang Tahun 2021



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

BAB VI
PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Laporan tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain itu, RLPPD merupakan sarana untuk masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kabupaten Lumajang kepada Menteri dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2021. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2021 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2021, hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Disamping berbagai keberhasilan yang dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian RLPPD Kabupaten Lumajang tahun 2021, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Lumajang. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.